



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT DANAREKSA (PERSERO)
UNIT KERJA : DEWAN KOMISARIS

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ROBERT PAKPAHAN**
2. Jabatan : **KOMISARIS UTAMA MERANGKAP KOMISARIS INDEPENDEN**
3. NHK : **69483**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 15.310.300.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 197 m2/178 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 2.799.225.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 360 m2/315 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 5.901.075.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 18.15 m2/18.15 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 33 m2/33 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 530.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 900 m2/252 m2 di KAB / KOTA ---, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 4.400.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 33 m2/33 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 530.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 646.000.000**

1. MOBIL, MERCEDES BENZ ML400 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
2. MOBIL, TOYOTA SIENTA Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
3. MOBIL, TOYOTA CAMRY Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 36.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 2.891.500.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	3.069.646.390
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	8.751.253.347
F. HARTA LAINNYA	Rp.	412.011.596
Sub Total	Rp.	31.080.711.333
III. HUTANG	Rp.	15.415.086
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	31.065.296.247

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.